BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kota Cimahi

Pada tahun 1901 Cimahi dibentuk sebagai kewedanan yang meliputi 5 kecamatan yaitu Cimahi, Padalarang, Batujajar, Cipatat, dan Cisarua. Selanjutnya Cimahi sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan sehingga yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Pada saat itu Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Blitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan

Kota Cimahi ditetapkan sebagian kawasan pemukiman, kawasan militer dan zona industri. Sejak tahun 1975 Kotif Cimahi telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama disebabkan oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Kotif Cimahi sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategi, baik dari segi ekonomi, maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut dan

memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kotif Cimahi perlu dibentuk menjadi Pemerintah Kota Cimahi.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayan, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup serta kewenangan di bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.Sejak terbentuknya Kota Cimahi, keberadaannya telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, sehingga pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Pembangunan Kota Cimahi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah, serta suasana kondusif dari masyarakat Kota Cimahi.

Kota Cimahi yang secara geografis berbatasan langsung dengan pusat ibu kota Provinsi Jawa Barat serta memliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan regional Bandung Raya sangat terpengaruhi oleh setiap perkembangan yang terjadi di Kota Bandung sehingga hal tersebut menyebabkan tingginya arus pergerakan dari maupun ke Cimahi. Guna memahami mengapa, bagaimana dan dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi melaksanakan fungsinya, perlu membahas kondisi lingkungan di Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Geografis dan Demografis Kota Cimahi

Kota Cimahi secara geografis, terletak pada koordinat 106^0 40" BT dan 6^0 55" LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah (Kab Bandung Barat).
b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir (Kota Bandung).
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Marga Asih (Kab Bandung) dan Kecamatan Bandung Kulon (Kota Bandung).
d. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar (Kab Bandung Barat).

Luas wilayah Kota Cimahi seluruhnya adalah 4.025,73 Ha, yang secara administratif terdiri atas 3 Kecamatan dan 15 kelurahan, dengan topografi wilayah merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Cimahi akhir Tahun 2012 sebanyak 647.545 Jiwa yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Cimahi Utara 174.127 Jiwa (26,89%) dengan kepadatan 124,15 Jiwa /Ha, Kecamatan Cimahi Tengah 192.108 Jiwa (29,67%) dengan kepadatan 184,94 Jiwa/ha, dan Kecamatan Cimahi Selatan 281.310 Jiwa (43,44%) dengan kepadatan penduduk 160,38 Jiwa/ha. Tingkat pertambahan penduduk dalam kurun waktu 3 Tahun (2008-2012) rata-rata 2,80%.

3.1.2 Keadaan Penduduk Kota Cimahi

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk menjadikan masyarakatnya sebagai bagian dari proses tersebut. Keberhasilan penyelenggaran pemerintahan tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat atau penduduk daerah yang bersangkutan. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawabnya adalah dengan adanya sikap yang mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah daerah harus mampu memberikan perhatian khusus terhadap penduduknya, baik dari segi pelayanan maupun dari segi pemberdayaan yang dapat menunjang kehidupan penduduknya.

Kota Cimahi terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan seluas 40,25 km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 452.390 jiwa, dan 15 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Cimahi Selatan (16,02 km2) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Cimahi Tengah (10,87 km2). Secara geografis, wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara ±1.040 meter dpl (Kelurahan Ciparegan Kecamatan Cimahi Utara) yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ±685 dpl (di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3,830 l/dt, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas,

Ciputri, Cimindi, Cibeureum (masing-masing di bawah 200 l/dt) dan Kali Cisangkan (496 l/dt),

Sementara itu mata air yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda dengan debit air 4 l/dt dan mata air Cisintok (93 l/dt). Potensi wilayah yang terdapat di kota ini dari sektor pertanian, yaitu tanaman padi sawah dan jagung yang lebih dominan di Kecamatan Cimahi Utara, sedangkan komoditi lainnya seperti ubi kayu, ubi jalar berada di Cimahi Tengah. Rata-rata produksi untuk beberapa komoditi di Cimahi Tengah kecuali jagung berada di Cimahi Selatan. Jumlah penduduk terbesar Kota Cimahi berada di Kecamatan Cimahi Selatan dengan jumlah 195.167 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kawasan industri yang secara tak langsung menyerap tenaga kerja dibandingkan Cimahi Tangah dan Cimahi Utara yang pada umumnya lebih dominan sebagai kawasan permukiman.

Berikut ini adalah jumlah penduduk Kota Cimahi di bulan Desember 2012 :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Cimahi

No	Kelurahan/ Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	Cibeber	14,476	13,987	28,463	4.40
2	Cibeureum	39,142	37,893	77,035	11.90
3	Leuwigajah	25,352	24,985	50,337	7.77
4	Melong	40,446	39,316	79,762	12.32
5	Utama	23,025	22,688	45,713	7.06
	Cimahi Selatan	**142,441**	**138,869**	**281,310**	**43.44**
6	Baros	13,627	13,228	26,855	4.15
7	Cigugur Tengah	29,090	28,472	57,562	8.89
8	Cimahi	7,453	7,426	14,879	2.30
9	Karangmekar	10,485	10,258	20,743	3.20
10	Padasuka	21,963	21,369	43,332	6.69
11	Setiamanah	14,478	14,259	28,737	4.44
	Cimahi Tengah	**97,096**	**95,012**	**192,108**	**29.67**
12	Cibabat	30,794	30,049	60,843	9.40
13	Cipageran	25,494	24,915	50,409	7.78
14	Citeureup	20,341	20,132	40,473	6.25
15	Pasirkaliki	11,323	11,079	22,402	3.46
	Cimahi Utara	**87,952**	**86,175**	**174,127**	**26.89**
	KOTA CIMAHI	**327,489**	**320,056**	**647,545**	**100.00**
Prosentase		**50.57**	**49.43**	**100.00**	

Sumber : Database Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2011

Sebagai kota yang merupakan bagian dari Wilayah Bandung Metropolitan Area (BMA), penduduk yang tinggal di kota Cimahi tergolong heterogen, disebabkan tingginya tingkat migrasi dari luar daerah ke Kota Cimahi. Hal tersebut menyebabkan Kota Cimahi mengalami keterbatasan daya tampung penduduk, sehingga menuntut prasarana dan sarana dasar seperti perumahan, fasilitas umum serta fasilitas lainnya, serta masih terdapatnya penduduk yang belum terserap pada berbagai sektor lapangan pekerjaan sebesar 41.897 orang. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perkembangan keluarga sejahtera atau prasejahtera.

Untuk melihat keadaan Kota Cimahi berdasarkan table penduduk menurut kelompok umur,. table penduduk Kota Cimahi Kelompok umur dapat dilihat pada table 3.2

Tabel 3.2
Penduduk Kota Cimahi Berdasarka
Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1.	75+	2940	4543	7,483	1.22
2.	70-74	3375	3435	6,810	1.11
3.	65-64	5052	5484	10,536	1.72
4.	60-64	6428	6604	13,032	2.13
5.	55-59	10831	10071	20,902	3.41
6.	50-54	14929	13633	28,562	4,67
7.	45-49	18612	18351	36,963	6.04
8.	40-44	24484	22905	47,963	7.74

9.	35-39	29846	28903	58,749	9.60
10.	30-34	33785	33498	67,283	10.32
11.	25-29	30756	32434	63,190	10.32
12.	20-24	25280	24711	49,991	8.17
13.	15-19	24784	23971	48,755	7.96
14.	10-14	27962	26490	54,454	8.90
15.	5-9	29997	28362	58,359	9.53
16.	0-4	20491	19219	39,710	6.49
JUMLAH		**309,552**	**302,616**	**612,168**	**100.00**

Sumber : Database Kependudukan Kota Cimahi tahun 2011

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kota Cimahi adalah laki-laki dengan jumlah 309,552, dan jumlah perempuan 302,616. Dengan jumlah penduduk di Kota Cimahi sekitar 612,168 penduduk.

Cimahi sebagai kota yang berada di kawasan Jawa Barat dan berdekatan dengan Bandung sebagai pusat pemerintah di jawa barat dengan jumlah penduduk sekitar 612,168 penduduk, memiliki perbedaan agama/kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Kota Cimahi.

Berikut ini adalah tabel pendudukan Kota Cimahi berdasarkan agama/kepercayaan ditabel 3.3

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kota Cimahi
Berdasarkan Agama /Kepercayaan

No.	Keluraha/ kecamatan	Agama							Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Budha	Hindu	Khong hu chu	Lainnya	
1.	Cibeber	24,418	735	431	16	23	0	4	26,627
2.	Cibeureum	68,799	3,526	1,035	157	40	0	29	73,586
3.	Leuwigajah	43,685	2,292	1,195	46	93	1	70	47,382
4.	Melong	69,799	4,262	1,014	231	28	8	2	75,344
5.	Utama	42,420	727	488	79	19	6	4	**43,743**
	Cimahi Selatan	**250,121**	**11.542**	**4,163**	**529**	**203**	**15**	**109**	**266,682**
6.	Baros	23,369	1,539	1,093	**11**	160	0	2	26,174
7.	Cigugur Tengah	53,647	1,364	355	72	29	0	3	55,470
8.	Cimahi	13,158	766	158	75	1	0	3	14,161
9.	Karangmekar	17,224	1,901	582	163	50	0	25	19,945
10.	Padasuka	39,371	1,361	444	43	68	0	1	184,653
11.	Setiamanah	25,686	1,394	349	95	88	0	0	27,612
	Cimahi Tengah	**172,455**	**8,325**	**2,981**	**459**	**396**	**3**	**34**	**184,653**
12.	Cibabat	52,852	2,657	882	66	88	0	29	56,574
13.	Cipageran	43,619	1,963	586	27	73	4	55	46,327
14.	Citeurep	34,870	1,410	519	50	23	0	11	36,883
15	Pasirkaliki	19,007	1,256	706	32	36	0	12	21,049
	Cimahi Utara	**572,924**	**27,153**	**9,837**	**1,163**	**819**	**22**	**250**	**612,168**
KOTA CIMAHI		**572,924**	**27,153**	**9,837**	**1,163**	**819**	**22**	**250**	**612,168**
Prosentase		**93.58**	**4.44**	**1.61**	**0.19**	**0.13**	**0.004**	**0.04**	**100.00**

Sumber : Database Kependudukan Kota Cimahi 2011

Jumlah penduduk yang menganuat agama Islam, Kristen, Katholik, budha, Hindu, dan Khong hu chu yang berada di Kota Cimahi berjumlah 612,168. Jumlah tersebut tersebar di beberapa Kecamatan yang berada di kawasan Kota Cimahi. Warga-warga yang berbeda agama tersebut hidup berdampingan satu dengan yang lain dan saling menghargai agama masing-masing sehingga masyarakat di Kota Cimahi hidup dengan rukun.

Dibawah ini adalah tabel penduduk Kota Cimahi Berdasarkan tingkat pendidikan yang telah lulus / yang telah ditamatkan. Tingkat pendidikan tersebut ditamatkan/ diselesaikan. Berikut ini adalah tabel3.4 :

Tabel 3.4
Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tingkat Penduduk Yang Ditamatkan)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	presentase
1.	Strata III	382	0.06
2.	Strata II	3.399	0.56
3.	Diploma IV/Strata I	34,722	5.67
4.	Akademi/dII/DIII	23,049	3.77
5.	DI	8.189	1.34
6.	SLTA/Sederajat	179,749	29.36
7.	SLTP/Sederajat	111.449	18.21
8.	SD/Sederajat	101.242	16.54
9.	Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat	63.835	10.43
10.	Tidak/Belom Sekolah	86,152	14.07
JUMLAH		**612.168**	**100.00**

Sumber : Database Kependudukan Kota Cimahi 2011

Berdasarkan data diatas menunjukan kesadaran masyarakat akan pendidikan di Kota Cimahi sangat tinggi. Terbukti bahwa tingkat pendidikan di Kota Cimahi mencapai tingkat Strata III (S3) ini menunjukan bahwa masyarakat di Kota Cimahi menjungjung tinggi tingkat pendidikan. Kesadaran masyarakat akan pendidikan mencerminkan bahwa masyarakat Kota Cimahi berpikir cerdas untuk menyekolahkan putra-putrinya setinggi mungkin sehingga tingkat pendiidkan di Kota Cimahi semakin membaik.

Kota Cimahi merupakan Kota yang memiliki cukup banyak lapangan pekerjaan. Ini yang menjadikan masyarakat bekerja di Kota Cimahi, karena Kota Cimahi memliki beberapa lapangan pekerjaan, seperti industri/pabrik, bidang kesehatan, pertanian maupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya.

Berikut ini adalah tabel 3.4 yang menunjukan penduduk Kota Cimahi berdasarkan jenis pekerjaan :

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Kota Cimahi
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	L	P	L+P	Prosentase
1.	Wiraswasta	32,385	5,976	38,361	14.55
2.	Karyawaan Swasta	67,522	34,590	102,112	38.74
3.	Karyawan BUMN/BUMD	2,610	675	3,285	1.25
4.	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	17,304	7,661	24,965	9.47
5.	Pedagang/Perdagangan	8,623	1,955	10,578	4.01
6.	Buruh/industry	25,744	4,979	30,723	11.65
7.	Bidang Kesehatan	335	1.025	1,360	0.52
8.	Tidak Bekerja	24,056	16,593	40,649	`15.42
9.	Kelompok Profesi	2,564	2,934	5,498	2.09
10.	Pertanian	1,132	145	1,277	0.48
11.	Lain-lain	3,824	980	4,804	1.83
JUMLAH		184,602	77,123	263,612	100.00

Sumber : Database Kependudukan Kota Cimahi 2011

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa masyarakat Kota Cimahi mempunyai pekerjaan yang menguras banyak waktu ditempat pekerjaannya. Pekerjaan masyarakat Kota Cimahi menunjukan bahwa masyarakatnya mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak sedikit masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

3.1.3 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

3.1.3.1 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kelembagaan/dinas yang di bentuk Bulan Februari 2011, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang dinas daerah. Merupakan manifestasi akselerasi program penataan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta adanya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk kependudukan secara Nasional dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Eksistensi dinas ini menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam Undang-Undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Fokus utama dari pelayanan administratif/administrasi kependudukan meliputi; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.Kegiatan pendaftaran penduduk, meliputi; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kegiatan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan KK, KTP, mutasi penduduk;pengelolaan database kependudukan, pencatatan dan penerbitan surat

keterangan kependudukan, Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK) dan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) kegiatan pencatatan sipil berupa; pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi yang bukan beragama islam, pencatatan dan penerbitan akta perceraian bagi yang bukan beragama islam, pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak, pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak sedangkan Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang menggunakan SIAK merupakan alat untuk memfasilitasi pengelolaan database kependudukan, penerbitan NIK, dan penerapan *e*-KTP.

3.1.3.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

Sejalan dengan visi Kota Cimahi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mempunyai Visi Dinas yaitu **" Terwujudnya penduduk yang teridentitas, masyarakat yang sejahtera dan Tenaga Kerja produktif dan berdaya saing"**

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

Dalam mewujudkan Visi Dinas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mempunyai 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan di bidang Kependudukan

Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk merupakan Penyelenggaraan pelayanan publik, berarti setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Terkait juga dengan hal tersebut perlu terus dibenahi organisasi, sistem maupun perilaku penyelenggaranya sebagai wujud reformasi dalam pelayanan publik bidang administratif.

Penertiban administrasi kependudukan melibatkan institusi terbawah mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, sehingga perlu adanya sinergitas program yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Prosedur dan mekanisme kerja perlu dipahami melalui sosialisasi kepada seluruh lapisan mayarakat. Peningkatan kualitas pelayanan meliputi jenis, kuantitas dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat memperloleh pelayanan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat yang ditandai pemberian pelayanan secara cepat, tepat dan mudah dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan Sumber Daya Manusia yang tersedia.

2. Meningkatkan pelayanan di bidang Pencatatan Sipil.

Penyelenggaraan administrasi pencatatan Sipil sama halnya dengan Penyelenggaraan administrasi kependudukan keduanya merupakan Penyelenggaraan pelayanan publik, berarti setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Terkait juga dengan hal tersebut perlu terus dibenahi organisasi, sistem maupun perilaku

penyelenggaranya sebagai wujud reformasi dalam pelayanan publik bidang administratif.

Penertiban administrasi kependudukan melibatkan institusi terbawah mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, tidak ketinggalan dari unsur Kantor kementrian Agama/Penghulu, Gereja dan tenaga medis sehingga perlu adanya sinergitas program yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Pemahaman proses dan mekanisme kerja perlu dipahami melalui sosialisasi kepada seluruh lapisan mayarakat. Peningkatan kualitas pelayanan meliputi jenis, kuantitas dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat memperloleh pelayanan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat yang ditandai pemberian pelayanan secara cepat, tepat dan mudah dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan Sumber Daya Manusia yang tersedia.

3. Meningkatkan kualitas Data Administrasi Kependudukan.

Kualitas Sumber Daya manusia yang terampil dan produktif merupakan prasyarat pembentukan manusia yang berjiwa profesional dan memiliki daya juang serta daya saing. Peningkatan kemampuan tersebut di arahkan selain untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang akhirnya dapat memberikan penyajian data yang benar melalui suatu metodologi dan diakui validitasnya.

4. Meningkatkan kualitas di bidang Informasi Data dan Kependudukan.

Peningkatan kualitas pelayanan selain ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.

Sarana dan prasarana pelayanan sangat menentukan tingkat kecepatan, ketepatan dan kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan mampu memberikan kepuasan bagi pihak yang dilayani. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Sesuai dengan Misi Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil, sasaran yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2011 adalah:

1. Meningkatkan Pemerataan penyebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan database kependudukan yang tepat, akurat dan *up to date*.
3. Meningkatkan kesadaran kepemilikan bukti identitas kependudukan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepemilikan bukti hukum kependudukan masyarakat Kota Cimahi.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial.
6. Meningkatkan rehabilitas dana kesejahteraan sosial.
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyediaan Sarana, Prasarana dan Sumberdaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretariat, 3 orang Sub Bagian, 3 orang Kepala Bidang, dan 6 orang Kepala Seksi dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Kepala Bidang Kependudukan.
4. kepala Bidang Pencatatan Sipil.
5. Kepala Bidang Data dan Informasi

3.1.4 Deskripsi Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah, yaitu di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dalam pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Kependudukan, Pencatatan Sipil serta Data dan Informasi Kependudukan

4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Adapun deskripsi tugas dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretariat, 3 orang Kepala Bidang.

1. Deskripsi Tugas Kepala Dinas Adalah:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah,dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Deskripsi Tugas Sekertariat adalah:

Bagian kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok, bagian sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian tugas-tugas administrasi bidang-bidang berikut komponen yang ada dilingkungan Dinas.
b. Pembinaan tugas administrasi program dan pelaporan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Sub Bagian yang ada di lingkungan Bagian Tata Usaha.
c. Penyusunan perencanaan dan program dinas baik rutin maupunpembangunan sesuai dengan rencana seluruh komponen Dinas
d. Pemberian bimbingan teknis ketatusahaan kepada seluruh komponen bidang-bidang.
e. Penyusunan pelaporan pertanggung jawaban Dinas secara berkala.

f. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan
g. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan di bidang ketatausahaan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Sekertariat dibantu oleh:
    1. Subag Program & Pelaporan.
    2. Subag Keuangan.
    3. Subag Umum & Kepegawaian

3. Deskripsi Tugas Kepala Bidang Kependudukan Dan Pencaatatan Sipil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pendaftaran penduduk, penerbitan administrasi kependudukan dan mutasi penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk.
b. Pelaksanaan kegiatan penerbitan administrasi kependudukan.
c. Pelaksanaan kegiatan mutasi penduduk
d. Pelaksanaan kegiatan pengendalian mobilitas penduduk dan penanganan urbanisasi
e. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data penduduk.
f. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi penduduk.

g. Perencanaan Bidang Catatan Sipil.
h. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta-akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian
i. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pencatatan di bidang Catatan Sipil
j. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencatatan akta-akta dibidangCatatan Sipil.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi :

A. Kasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas dan mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan rencana teknis Pendaftaran Penduduk.
    b. Penyusunan bahan petunjuk teknis Pendaftaran Penduduk.
    c. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Penduduk.
    d. Pengawasan perubahan daftar atau mutasi penduduk.
    e. Pengendalian penduduk yang meliputi penyuluhan dan Yustisi Kependudukan.
    f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Kasi Pencatatan Sipil
    a. Penyusunan rencana teknis Pencatatan Akta Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak.

b. Pencatatan Akta Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak
c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Akta Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Penyusunan rencana teknis pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian
f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian.
g. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data

a. Penyusunan rencana teknis kegiatan Evaluasi dan Pelaporan penduduk.
b. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan mobilitas penduduk yang meliputi perpindahan penduduk, perubahan status kependudukan dan penanganan urbanisasi.
c. Pengkoordinasian kegiatan evaluasi dan pelaporan dengan unit kerja terkait

3.1.5 Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah disebut diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas yaitu :

1. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan data base Kependudukan.
2. Meningkatnya Peran serta masyarakat
3. Meningkatnya ketaatan Prosedur dan Mekanisme penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Meningkatnya efektivitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan Meningkatnya masyarakat yang memiliki identitas.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Kota Cimahi.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Bagong Suyanto dalam buku Metode Penelitian Sosial: *Berbagai Alternatif Pendekatan*, Metode penelitian deskriptif adalah:

> "Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau objek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif dapat bertipe kuantitatif dan kualitatif dan biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau objek amatan secara rinci". (Suyanto, 2005:17-18)

Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan masalah secara rinci, dalam metode deskriptif terdapat dua tipe kuantitatif dan kualitatif. Melihat dua

tipe tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif*, bahwa

metode penelitian kualitatif adalah:

> "Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi".(Sugiyono, 2005:1)

Sesuai dengan pendapat Sugiyono, maka metode penelitian kualitatif merupakan prsosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini lebih menekankan pada interpretasi makna daripada generalisasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan peranan dinas kependudukan dan pencatatn sipil kota Cimahi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki *e*-KTP di kota Cimahi. Peneliti akan meneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan bukan berdasarkan generalisasi.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

3.2.1.1 Studi Pustaka

Metode Pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa literature yang berhubungan dengan pembuatan *e*-KTP di Kota Cimahi. Maksud dari studi pustaka ini adalah agar penulis mempunyai konsep yang jelas sebagai pegangan teori dalam pemecahan masalah dengan cara mencari dan menghimpun data serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan kinerja dan *e*-KTP yang akan diteliti.

3.2.1.2 Studi Lapangan

1. Observasi Non Partisipan

   Penulis mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung tanpa turut serta dalam melaksanakan pembuatan *e*-ktp di Kota Cimahi

2. Wawancara

   Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber atau orang yang mengetahui tentang masalah pembuatan *e*-ktp di kecamatan Cimahi Selatan

3. Dokumentasi

   Penulis mengambil dokumentasi berupa foto-foto dan gambar yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Kecamatan Cimahi Selatan

3.2.2 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive. Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Sanapiah Faisal teknik pengambilan sampel purposif adalah :

> "Teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangann tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti" (Faisal, 1996:67).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok informan. Kelompok informan pertama adalah Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Hal ini berkaitan dengan peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Penentuan kelompok informan kedua untuk narasumber adalah masyarakat yang membutuhkan informasi. Peneliti menggunakan teknik pengambilan purposive. Yang diwawancarai adalah masyarakat Kota Cimahi yang pernah membuat *e*-KTP . Hal ini dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparatur yang mengurus proses pembuatan *e*-KTP, karena aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang turun langsung kelapangan dalam pembuatan *e*-KTP :
    a. Muhammad Faisal S.Si

Alasannya karena aparatur ini sebagai pelaksana dan terjun langsung kelapangan sehingga mengetahui permasalahan yang terjadi.

b. Dinda Zulfikri S.E

Alasannya karena aparatur ini sebagai pelaksanan dan terjun langsung kelapangan sehingga mengetahui permasalahan yang terjadi.

c. Khamsa Hajwarin

Alasannya karena aparatur adalah sebagai seksi sistem informasi kependudukan.

d. Subari Rahman S.STP

Alasannya karena aparatur adalah sebagai seksi sistem informasi kependudukan

e. Adi Achmad Taufik S.Si

Alasannya karena aparatur sebagai seksi bidang data dan informasi dan sebagai pelaksana

2. Masyarakat Kota Cimahi yang dalam hal ini menjadi pembuatan dan berdomisili di Kota Cimahi

a. Sofie Riana S.Si perwakilan masyarakat Kota Cimahi Tengah

b. Riki Kurnia

c. Rizki K. Perwakilan masyarakat Cimahi Tengah

d. Ryvia Tisha Perwakilan masyarakat Cimahi Utara

e. Ahmad syahidin. Perwakilan masyarakat Cimahi Selatan

3.2.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian adalah analisis deskriftif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai "strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana *(setting)* tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar *(grounded)* dalam data" (Suyanto, 2005:183).

Penulis menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk di interprestasikan. Data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3.2.4 Lokasi Penelitian

Lokasi-Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yaitu bertempat di :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jln Demang Hardjakusumah lantai 1
2. Masyarakat di Kota Cimahi

3.2.5 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaaan penelitian yang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	2012	2013						
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Penyusunan rancangan Judul								
Penyusunan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan Penelitian								
Penelitian di Lapangan								
Pengolahan Data								
Sidang Ujian Skripsi								